

KONFLIK WADAS DALAM PERSPEKTIF KONFLIK SOSIAL STRUKTURALISME

Michael Sanrio Ramelan*, Panji Suwarno, Irwan Triadi, Pujo Widodo, Achmed Sukendro

Universitas Pertahanan Indonesia

*Email: michaelsanrio05@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates social conflict in Wadas Village from the perspective of Structuralist social conflict, focusing on interactions between the government and local communities in the context of andesite mining development plans. A qualitative approach with case studies was used to explore the dynamics of this conflict, collecting data from literature studies and involving in-depth interviews with various related parties. Research subjects include the Wadas Village community as a group directly affected and the government as the force that initiates and regulates the development process. This research reveals that these conflicts do not simply stem from individual or local disputes, but more deeply from structural inequalities in access to and control over resources and development decisions. The government, in its role as the highest structure, dominates the development process without adequately considering the interests and aspirations of local communities who are often marginalized. This creates significant tension between the bourgeois class who have greater economic and political access and the proletarian class who rely on local resources for their livelihood. The results of this research highlight the need for structural reforms in development policies that are more inclusive and equitable, as well as increasing community participation in decision making regarding natural resources. The implications of these findings can help in designing policies that are more responsive to local needs, reduce social tensions, and promote economically, socially, and environmentally sustainable development in the region.

Keywords: structuralism, social conflict, wadas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat untuk memajukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang maju dapat membuat kehidupan masyarakat sejahtera. Salah satu wilayah yang

memiliki kelimpahan sumber daya alam adalah Desa Wadas yang terletak di Jawa Tengah. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) melakukan survey potensi ekonomi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, serta Perpustakaan Jalanan menyebutkan bahwa seluruh tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Wadas memiliki nilai hingga Rp 241 juta per tahun, kayu sengon mencapai Rp 2 miliar per tahun, vanili bernilai hingga Rp 266 juta pertahun, kemukus bernilai hingga Rp 1,35 miliar per tahun, serta durian yang bernilai hingga Rp 1,34 miliar per tahun (Muryanto, 2021). Selama ini, hampir seluruh warga Desa Wadas yang secara turun temurun bekerja sebagai petani memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan subur desa atau biasa disebut sebagai pertanian multikultur. Melalui sistem pertanian multikultur ini, warga Desa Wadas dapat memiliki penghasilan dari berbagai jenis tanaman sepanjang tahun secara bergantian (Muryanto, 2021).

Namun saat ini Wadas tengah menghadapi konflik dengan pemerintah perihal Program Strategis Nasional yaitu pembangunan Bendungan Bener. Pembangunan bendungan ini terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Purworejo. Sumber permasalahan konflik ini adalah dibukanya penambangan batu andesit di Desa Wadas guna keperluan pembangunan Bendungan Bener. Warga desa pun menolak akan wacana pemerintah yang akan membuka kegiatan tambang batu andesit di Wadas karena dikhawatirkan akan merusak sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi desa tersebut. M. Yushar selaku Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bener, M. Yushar menyebutkan bahwa terdapat sekitar 40 juta meter³ batu andesit yang tertanam di bukit Wadas. Namun sejauh ini batu andesit yang diambil hanya di angka 8,5 juta meter³ saja. Maka dari itu, menurutnya setiap pemilik tanah diharuskan mendapatkan ganti rugi dengan nominal setidaknya Rp 120.000 per meter persegi. Selain itu, tanah yang dikuasi oleh pemerintah juga seharusnya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat melalui kesepakatan antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) (Muryanto, 2021).

Walaupun mendapat penolakan dari masyarakat, kegiatan penambangan batu andesit di wilayah Desa Wadas tetap dilaksanakan. Kebijakan mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah, mengingat Jawa Tengah merupakan tuan rumah dalam pembangunan PSN. Penetapan ini menjadikan pengadaan tanah berlokasi di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang No 590/20 Tahun 2021 tentang lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

(Anggraini, 2022). Setelah adanya kebijakan ini, konflik masih tetap berlanjut karena warga menolak adanya penambangan.

Konflik wadas, atau konflik terkait sumber daya air, dapat dipahami melalui lensa strukturalisme dalam konteks konflik sosial. Perspektif strukturalis menyoroti bahwa konflik wadas tidak hanya muncul sebagai hasil langsung dari perselisihan antar individu atau kelompok, tetapi lebih dalam lagi dari ketidaksetaraan struktural dalam akses dan pengelolaan sumber daya air (Hidayat, 2022). Di banyak kasus, ketimpangan ekonomi, politik, dan kekuasaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal menjadi pemicu utama konflik ini. Misalnya, dalam skenario di mana proyek pembangunan infrastruktur seperti bendungan dilaksanakan tanpa konsultasi yang memadai terhadap masyarakat lokal, ketidakpuasan dan protes sering kali muncul karena masyarakat merasa hak-hak mereka terabaikan dan terpinggirkan.

Selain itu, perspektif strukturalis juga menekankan bahwa konflik wadas sering kali mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya air. Ketika keputusan terkait pengalokasian air diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat secara adil, hal ini dapat memperdalam ketegangan dan menghasilkan konflik sosial yang berkelanjutan (Munir, 2015). Akibatnya, konflik wadas tidak hanya menjadi masalah teknis tentang manajemen air, tetapi juga menjadi isu yang melibatkan ketidaksetaraan struktural yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Dengan memahami konflik wadas melalui perspektif strukturalis, upaya penyelesaiannya dapat lebih terfokus pada reformasi struktural yang mengarah pada keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata atas sumber daya air. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana perspektif strukturalisme dapat digunakan untuk menjelaskan konflik di Wadas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kemudian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Wadas dan pemerintah dengan objek penelitian adalah konflik sosial. Peneliti memperkuat temuan data dari bukubuku serta jurnal. Sumber lainnya peneliti dapatkan dari internet melalui laman-laman berita. Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori strukturalisme yang mengedepankan segala ketidakadilan lahir akibat ketidak setaraan sktrutural antara masyarakat dengan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Strukturalisme Menjelaskan Konflik Wadas

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat Desa Wadas dapat dilihat sebagai manifestasi dari perbedaan struktural, dimana sebagai puncak struktural, pemerintah menggunakan pengaruhnya dalam berkonflik dengan masyarakat Wadas yang memiliki struktur paling rendah sebagai rakyat biasa melalui kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang dinamika konflik sosial di tingkat lokal antara pemerintah dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial yang relevan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Rekomendasi untuk kebijakan publik dan intervensi sosial dapat dirumuskan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wadas.

Pembangunan Bendungan Bener

Bendungan Bener Purworejo menjadi salah satu PSN (Proyek Strategis Nasional) yang disusun oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Maka dari itu, Bendungan Bener Purworejo bisa dibilang merupakan salah satu PSN di bawah naungan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penanggungjawab dalam proyek ini adalah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang diturunkan kepada BBSW (Balai Besar Wilayah Sungai) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air. Apabila terlaksana, Bendungan Bener Purworejo akan memiliki tinggi 150 meter dan merupakan bendungan tertinggi pertama di Indonesia dan menjadi yang kedua di Asia Tenggara (Anggraini, 2022).

Perkiraan anggaran PSN Bendungan Bener ini mencapai sekitar Rp 2,06 triliun dengan kemampuan menampung air sebanyak 90,39 m³ yang dapat menggenangi lahan seluas 313 hektar. Lahan ini mencakup di wilayah 3 desa di Kabupaten Wonosobo serta 4 desa di Kabupaten Purworejo. Terdapat 1.500 liter/detik suplai air bersih yang nantinya sekitar 700 liter/detik akan dialirkan ke Kabupaten Kulon Progo, 500 liter/detik akan dialirkan ke Kabupaten Purworejo, dan 300 liter/detik akan dialirkan ke Kabupaten Kebumen. Pada 700 liter/detik air yang dialirkan ke Kabupaten Kulon Progo, terdapat 200 liter/detik yang secara khusus akan dialirkan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), yaitu bandara yang juga menjadi PSN guna mendukung perekonomian dan pariwisata

di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan terdapat beberapa desa di Kabupaten Bener seperti Desa Wadas, Desa Kedung Loteng, Desa Guntur, Desa Kemiri, Desa Bener, Desa Laris, dan Desa Karang Sari akan dijadikan sebagai sdestinasi wisata, konservasi, serta perikanan (kumparan.com, 2022).

Berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Desa Wadas dipilih sebagai tempat penambangan batu andesit karena letaknya yang dekat dengan lokasi pembangunan Bendungan Bener. Jarak Desa Wadas dengan Bendungan Bener hanya terpaut 10 kilometer. Sebenarnya, adapula beberapa daerah yang memiliki potensi batu andesit hanya saja jaraknya yang cukup jauh dan kemungkinan besar pemerintah harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk melakukan penambangan batu andesit di daerah tersebut. Untuk kemudahan dan percepatan pembangunan Bendungan Bener, pemerintah mengambil alih lahan di Desa Wadas dan memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat. Terdapat sekitar 153,64 hektar lahan yang dibebaskan dengan rincian sekitar 145 hektar akan digunakan sebagai lokasi pertambangan dan 8,64 hektar sebagai akses yang digunakan untuk memasuki lokasi pertambangan. Atas dasar inilah, nantinya terdapat 1.800 jiwa penduduk Desa Wadas akan terdampak pembebasan lahan (ip.fisip.unas.ac.id, 2022).

Warga Wadas sebetulnya tidak mempermasalahakan akan pembangunan Bendungan Bener terlebih tujuan pembangunan bendungan tersebut untuk irigasi pertanian. Permasalahan dimulai saat hasil dari Amdal yang dilakukan mengatakan bahwa Wadas dapat dijadikan tempat pertambangan batu andesit untuk keperluan bahan material pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat menolak pertambangan ini karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan desa. Masyarakat Desa Wadas sangat menggantungkan hidupnya pada pertanian. Apabila pertambangan ini dibuka maka akan mempengaruhi lingkungan pertanian sekitar bahkan mungkin saja masyarakat kehilangan pekerjaannya. Selain itu, masyarakat pun khawatir akan sumber air yang nantinya dapat tercemar apabila adanya kegiatan pertambangan. Air juga menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat Wadas. Kegiatan pertambangan pun dapat menimbulkan resiko longsor, maka dari itu mayoritas masyarakat Desa Wadas terus melakukan penolakan atas pertambangan batu andesit ini. Alasan-alasan tersebut pun memperkuat masyarakat Desa Wadas untuk menolak.

Konflik Wadas Berdasarkan Perspektif Strukturalis

Konflik wadas, atau konflik terkait pengelolaan dan distribusi sumber daya air, dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif strukturalisme dalam konteks sosial. Perspektif ini menyoroti bahwa konflik wadas tidak semata-mata bersumber dari perselisihan lokal atau kepentingan individual, tetapi lebih dalam lagi dari ketidaksetaraan struktural dalam akses dan pengontrolan terhadap sumber daya air. Ketidaksetaraan ini mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial yang berperan dalam menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan air dan siapa yang terpinggirkan.

Dari sudut pandang ekonomi, konflik wadas sering kali muncul karena pengelolaan air yang cenderung menguntungkan sektor-sektor ekonomi besar seperti industri atau pertanian komersial yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Sementara itu, masyarakat lokal atau petani kecil yang bergantung pada sumber daya air untuk pertanian subsisten atau kebutuhan domestik mereka sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tersebut. Ketimpangan ini dapat menghasilkan ketegangan sosial yang signifikan, terutama di daerah-daerah di mana air adalah aset yang sangat bernilai dan vital bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dari segi politik, konflik wadas mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak merata. Keputusan terkait pengelolaan air sering kali dibuat dalam lingkungan politik yang korporatis atau oligarkis, di mana kepentingan politik atau ekonomi tertentu mendominasi atas kepentingan publik secara luas. Hal ini bisa mengakibatkan peningkatan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara adil dalam pengelolaan sumber daya air.

Perspektif strukturalisme juga menyoroti bahwa konflik wadas sering kali tidak hanya tentang akses fisik terhadap air, tetapi juga tentang akses ke keadilan sosial. Masyarakat yang merasa dirugikan dalam distribusi air sering kali mengangkat isu-isu keadilan yang lebih luas, termasuk hak mereka untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Konflik semacam ini bisa menjadi titik pijakan untuk pergerakan sosial yang menuntut reformasi struktural dalam kebijakan air, seperti penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya air.

Penyelesaian konflik wadas melalui lensa strukturalisme memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Reformasi yang berfokus pada keadilan

sosial, distribusi yang adil, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mengatasi akar penyebab konflik ini. Langkah-langkah konkret seperti pengembangan kebijakan yang inklusif, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya air dapat membantu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk menopang kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Seperti halnya masyarakat Desa Wadas yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Masyarakat Wadas pun menggantungkan ekonominya dari kegiatan pertanian tersebut. Namun, akhir-akhir ini kegiatan perekonomian masyarakat Desa Wadas terganggu dengan adanya pembangunan pertambangan batuan andesit di desa tersebut. Masyarakat Desa Wadas tidak keberatan dengan adanya proyek pembangunan Bendungan Bener terlebih bendungan tersebut akan dipergunakan sebagai sarana irigasi. Konflik dimulai saat Desa Wadas dipilih menjadi tempat pertambangan batuan andesit untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Masyarakat beranggapan bahwa dikhawatirkan kegiatan pertambangan tersebut akan merusak dan mencemari lingkungan serta sumber air Desa Wadas. Masyarakat pun takut akan kehilangan pekerjaannya terlebih pemerintah yang hendak mengambil alih lahan dan memberikan uang ganti rugi. Sedangkan dari sisi pemerintah, kegiatan pertambangan ini berasaskan kepentingan bersama untuk pembangunan Bendungan Bener. Menurut perspektif strukturalisme, pemerintah menggunakan kebijakan sebagai alat melawan masyarakat Wadas. Dengan posisi yang berbeda, tercipta ketidakadilan sehingga masyarakat Wadas tidak bisa melawan pemerintah. Kondisi ketidakadilan ini tentu akan memicu konflik yang jelas akan menghambat baik aktivitas masyarakat maupun pemerintah.

SARAN DAN REKOMENDASI

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap konflik ini adalah pemerintah harus meninjau kembali analisis dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Pemerintah pun harus turut mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, pemerintah harus membuka dialog dengan tokoh-tokoh desa untuk menjalin komunikasi yang baik. Sumber ketakutan masyarakat Desa Wadas adalah lingkungan yang tercemar serta hilangnya sumber perekonomian mereka, maka dari itu sudah sepantasnya pemerintah memberikan jaminan jangka panjang untuk masyarakat dari kegiatan pertambangan batu andesit ini. Keterbukaan

akan hasil analisis dampak lingkungan pun dapat memupuk rasa percaya masyarakat akan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2022). *Tentang Bendungan Bener yang Berujung Konflik di Wadas, Ini Rincian Proyeknya*. Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tentang-bendungan-bener-yang-berujung-konflik-di-wadas-ini-rincian-proyeknya-1xTchilqubt>, diakses 31 Juli 2024.
- Admin. (2022). *Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo: Cerminan Negara sebagai Predator*. Laman Ilmu Politik, FISIP Unas. <http://ip.fisip.unas.ac.id/en/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-bendungan-bener-di-desa-wadas-kabupaten-purworejo-cerminan-negara-sebagai-predator/>, diakses 31 Juli 2024.
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bener di Desa Wadas Kabupates Purworejo Tahap I (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138-153
- Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perpektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1). 1-19
- Anugerah, B. (2022). *Telaah Kasus Wadas*. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/365790156_Telaah_Kasus_Wadas
- Hidajat, K. (2021). Kasus Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*. 1(1). 1-8
- Hidayat, I. (2022). *Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Teks "Pelawan Tiran Dari Tanah Wadas" Majalah Tempo Edisi 28 Februari-6 Maret 2022)*. (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Kumparan. (2022). *Ganjar Beberkan Alasan Kenapa Desa Wadas yang Dijadikan Tambang Andesit*. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/ganjar-beberkan-alasan-kenapa-desawadas-yang-dijadikan-tambang-andesit-1xWoNHoWWcj?ref=login>
- Munir, M. (2015). Sistem Keakerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1)
- Muryanto, B. (2021). *Tanah Surga Wadas Dijadikan Tambang: Mengapa Pemerintah Menindas Petani?* Diakses melalui <https://projectmultatuli.org/tanah-surga-wadas-dijadikan-tambang-mengapapemerintah-menindas-petani/>
- Pariyatman, P., Harland, M., Santoso, P., & Majid, A. (2022). Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth). *Jurnal Komuniakatio* 8(2). 116-125

- Septiarti, S. W. (1994). Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sossiologis. *Cakrawala Pendidikan*. 3(8)
- VOI. (2022). *Refeleksi Kasus Desa Wadas: Ada Eskalasi Konflik Sosial Berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional Sepanjang 2020-2021*. Diakses melalui <https://voi.id/bernas/133165/refleksi-kasus-desa-wadas-ada-eskalasi-konfliksosial-berkaitan-dengan-proyek-strategis-nasional-sepanjang-2020-2021>
- Zid, M., & Alkhudri, A. T. (2019). *Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.